

EKSISTENSI LATAR BELAKANG POLITIK DALAM TINDAK PIDANA SUBVERSI MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 11/Pnps/1963

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

EMERSON H SIAHAAN

NRP 2860044

NIRM 86.7.004.12031.44810

©SURABAYA©

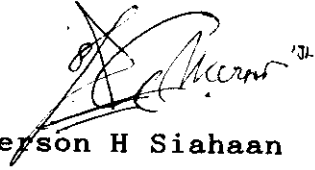
No. Reg : 201 / H / 91
Cat. Studi : 201 PI / A
Profil : -

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1991**



Surabaya, Mei 1991

Mahasiswa yang bersangkutan,



Emerson H Siahaan

Mengetahui

Dekan,



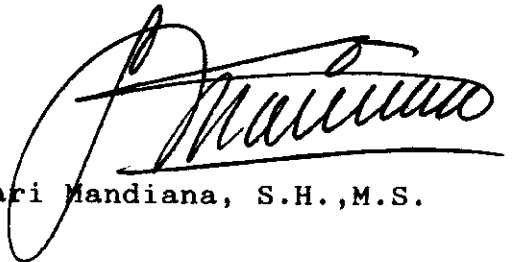
Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing,



R.S. Efendy, S.H.

Pembimbing,



Sari Mandiana, S.H., M.S.

Dalam perkembangan hukum pidana, telah muncul dan berkembang Undang-Undang hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Undang-Undang Tindak Pidana Subversi yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11/Pnps/1963, yang merupakan sumber utama hukum pidana di Indonesia.

UUTPS bertujuan untuk mencapai suatu usaha pemberantasan kegiatan-kegiatan subversi yang merupakan bahaya bagi keselamatan bangsa dan negara kita. Untuk mencapai hal itu tidaklah mudah, sebab ternyata perumusan delik subversi oleh UUTPS itu bersifat serba meluas dan serba meliputi ("All embracing" and "Multy Purpose Act"). Perumusan yang demikian membawa dampak terhadap pelaksanaan UUTPS dalam praktek penegakan hukum pidana politik itu sendiri.

Khususnya yang menyangkut unsur latar belakang politik dalam tindak pidana subvresi menjadi tidak jelas oleh karena dalam Pasal 1 UUTPS itu rumusan unsur-unsur tersebut kabur dan meluas. Sehingga timbul permasalahan dalam UUTPS itu menyangkut keberadaan latar belakang politik dalam setiap tindak pidana subversi yang dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya merasa terdorong untuk membahasnya dalam skripsi saya dengan

judul "Eksistensi Latar Belakang Politik Dalam Tindak Pidana Subversi Menurut Undang-Undang Nomor 11/Pnps/1963".

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mencari data-data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan skripsi. Untuk mencapai validitas skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan khusus tentang permasalahan eksistensi latar belakang politik dalam tindak pidana subversi menurut UUTPS.

Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan pendekatan secara yuridis normatif artinya dalam pembahasan masalah ini saya bertolak dari ketentuan dan norma-norma pidana khusus yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Untuk menyusun skripsi ini, data yang saya pergunakan adalah data sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang merupakan data dasar dalam suatu (Ilmu) penelitian. Data sekunder itu sendiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Alat pengumpul data yang dipakai adalah alat pengumpul data studi dokumen/bahan pustaka, dilakukan dengan membaca, kemudian data sekunder tersebut saya inventarisasi. Setelah itu saya melakukan klasifikasi/pengelompokan materi yang berhubungan dengan pidana khusus, terutama terhadap materi

yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini yaitu analisis kualitatif yakni hasil pemikiran secara nalar berdasarkan taraf sinkronisasi horisontal peraturan perundang-undangan subversi.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan dalam mencari data dibagi dalam beberapa fase yaitu :

- fase pengumpulan data : 2 Januari - 28 Januari 1991
- fase pengolahan data : 29 Januari - 28 Pebruari 1991
- fase laporan : 29 Pebruari - 10 April 1991

Pokok hasil penelitian dari skripsi ini yaitu terjadinya Putusan Pengadilan Pidana Subversi yang berbeda-beda di dalam memeriksa dan memutus perkara subversi sebagaimana yang dimaksud oleh UUTPS khususnya yang menyangkut unsur latar belakang politik dalam setiap tindak pidana subversi yang dilakukan. Kesemuanya itu disebabkan oleh rumusan yang serba meluas dan kabur, dalam UUTPS. Kesepahaman tentang harus adanya latar belakang politik dalam tindak pidana subversi menurut UUTPS terjadi setelah adanya Lokakarya para hakim seluruh Indonesia di Batu Malang yang diselenggarakan pada tanggal 23 - 26 Oktober 1978. Pasal 1 ayat 1 sub 1d UUTPS memungkinkan terjadinya tumpang tindih dengan delik-delik lain seperti tindak pidana

ekonomi, tindak pidana korupsi dan lain-lainnya. Adapun bunyi Pasal 1 ayat 1 butir 1d UUTPS merumuskan :

mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan, koperasi atau pengangkutan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau berdasarkan keputusan pemerintah atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat.

Sebagai obyek dari penelitian dalam menunjang penyusunan skripsi ini adalah Ketentuan-ketentuan atau Peraturan perundangan Nasional yang mengatur tentang Tindak Pidana Subversi serta Putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah Perpustakaan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Malang serta Kejaksaan Negeri Surabaya.

Akhirnya dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- UUTPS mempunyai perumusan yang sangat luas, serba meliputi dan bersifat kabur. Hal ini terbukti dengan adanya perumusan tindak pidana subversi dalam Pasal 1 ayat 1 sub 1 d UUTPS.
- Latar belakang politik sebagai unsur essensial tindak pidana subversi yang tidak dimuat dalam batang tubuh UUTPS, tetapi dimuat dalam Penjelasannya mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam penerapan

UUTPS, yang terwujud dalam putusan-putusan hakim yang berbeda satu dengan lainnya.

- Hasil Lokakarya para hakim seluruh Indonesia di Batu Malang bukanlah merupakan putusan hukum/yurisprudensi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para hakim/Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara subversi.

